

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN
(Studi Kasus Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Tamalanrea Kota
Makassar)**

Idhan (1465140012)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Fakhri Kahar, M.Si.

Pembimbing II : Dr. Muh. Nur Yamin, M.Si.

Penguji I : Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si.

Penguji II : Dr. Hj. Andi Aslinda, M.Si.

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Email: idhanibnunuridin@gmail.com

***ABSTRAK.** Implementasi Kebijakan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an (Studi Kasus Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar). Jurnal, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Fakhri Kahar dan Muhammad Nur Yamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kebijakan Baca-Tulis Al-Qur'an pada Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur'an pada Taman Pendidikan Al-Qur'an Jannatul Firaduz, Masjid Ikhtiar, dan Al-Amin di Kecamatan Tamalanrea, dengan mengidentifikasi proses-proses implementasi melalui 3 dimensi variabel umum menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yaitu Karakteristik dari Masalah, Karakteristik Kebijakan dan Variabel Lingkungan, ditarik kesimpulan bahwa program kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang pendidikan baca-tulis Al-Qur'an pada Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Tamalanrea terimplementasi dengan baik, namun dalam pelaksanaannya ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan baca-tulis Al-Qur'an seperti tidak tetapnya alokasi sumber daya finansial, pengaruh perkembangan teknologi, dan kesulitan teknis dalam pengajaran Al-Qur'an.*

Kata Kunci. Implementasi, Pendidikan Baca Tulis Al-Quran

1. PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat sebagai pedoman untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Kebijakan dapat diartikan sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk menciptakan keteraturan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, salah satu bentuk kebijakan pemerintah Indonesia ialah kebijakan pendidikan Islam sebagai bagian dari kebijakan pendidikan

nasional. Pendidikan Islam adalah kebutuhan dari ummat islam dengan berdasar pada Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk yang diturunkan Allah *Subhanahu Wata'Ala* ke dunia yang harus diyakini oleh setiap ummat Islam. Beriman kepada Kitab Al-Qur'an sebagai rukum Iman yang ketiga harus dibuktikan dengan mempelajarinya mengajarkannya dan mengamalkannya. Beberapa daerah di Indonesia

memandang perlu bahwa anak-anak dan pelajar harus memiliki kemampuan baca-tulis Al-Qur'an melalui pendidikan baca-tulis Al-Qur'an. Pandangan ini telah melahirkan kebijakan pemerintah daerah yang secara imperatif mewajibkan para peserta didik belajar baca tulis Al-Qur'an. Lahirnya kebijakan telah menandakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an adalah bagian dari tugas pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu daerah yang telah merumuskan peraturan tentang pendidikan baca-tulis Al-Qur'an ialah Daerah Kota Makassar. Makassar merupakan salah satu kota yang ada di Sulawesi Selatan dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar mencatat dari 1,4 juta jiwa penduduk terdapat setidaknya 82,39% penduduk yang menganut agama Islam¹. Hal ini menjadi mendorong pemerintah setempat bahwa pentingnya mengeluarkan peraturan daerah tentang pendidikan baca tulis Al-Qur'an. Implementasi kebijakan pemerintah tentang pendidikan baca tulis Al-Qur'an tentunya memiliki hambatan dan gangguan dalam pelaksanaannya, baik berupa dana pelaksanaan program pengadaan Al-Qur'an yang belum dianggarkan atau pelatihan guru ngaji yang belum dijalankan. Proses implementasi kebijakan dapat dipengaruhi faktor lain seperti sumber daya manusia, hal ini dapat dilihat dari tingkat komitmen pelaksana kebijakan yang masih kurang dan kemampuan pelaksana para implementor yang tidak sesuai kompetensi yang diinginkan. Perkembangan sains dan teknologi informasi serta budaya-budaya asing yang semakin menggeser minat untuk belajar baca tulis Al-Qur'an. Media hiburan yang semakin maju telah mempengaruhi aktivitas baca tulis Al-Qur'an. Anak-anak bahkan pelajar lebih

memilih menonton televisi dan bermain game *on-line* ataupun *off-line* daripada belajar membaca Al-Qur'an, kurangnya perhatian orang tua terhadap pandai baca tulis Al-Qur'an dan pandangan bahwa pandai baca tulis Al-Qur'an bukan suatu hal yang penting untuk kesuksesan masa depan anaknya mengakibatkan masyarakat menjadi kurang perhatian terhadap kebijakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an. Implementasi Peraturan Daerah tentang Pendidikan baca tulis Al-Qur'an seharusnya menjadi solusi terbaik dalam menjawab fenomena-fenomena tersebut, Peraturan Daerah tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an bisa menjadi pondasi kokoh untuk membentengi pengaruh buruk dari luar, mampu membangun dan menciptakan generasi yang berakhlak seperti yang tertulis dalam maksud dan tujuan peraturan tersebut. Maka menjadi hal penting proses implementasi kebijakan untuk mencapai keberhasilan dari kebijakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an Kota Makassar.

Penelitian ini berfokus pada implementasi dari kebijakan Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur'an dengan mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi atau pelaksanaan dari kebijakan pendidikan baca-tulis Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal di tingkat wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar pada tiga tempat Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yaitu TPQ Jannatul Firdaus, TPQ Masjid Ikhtiar, dan TPQ Al-Amin. Berdasarkan uraian masalah di atas, maka dalam hal ini tertarik melakukan penelitian tentang **"Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an (Studi Kasus Taman**

¹ Badan Pusat Statistik Kota Makassar.
Jumlah Penduduk Kota Makassar
Berdasarkan Agama. 10 Desember 2017.

<https://makassarkota.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/6>.

Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang menjadi pusat perhatian adalah **“Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Jannatul Firdauz, TPQ Masjid Ikhtiar, dan TPQ Al-Amin di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar?”**.

3. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah untuk **mengetahui proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Jannatul Firdauz, TPQ Masjid Ikhtiar, dan TPQ Al-Amin di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar**

4. TINJAUAN PUSTAKA

a. Konsepsi Kebijakan

kebijakan publik merupakan segala sesuatu dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh badan atau aparat pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu untuk kepentingan masyarakat. Konsep kebijakan publik mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik dibidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan dan sebagainya. Kebijakan juga dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal jika dilihat dari hirarkinya. Contohnya seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan

Keputusan Bupati/Walikota. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan produk pemerintah yang memiliki maksud dan tujuan untuk dicapai secara terstruktur yang bersifat dinamis dan dapat berbentuk positif atau negatif.

b. Konsep Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi merupakan representasi intelektual dari proses pelaksanaan suatu kebijakan. Menurut Agustino (2008: 139) dalam bukunya *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, bahwa “Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”², dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu usaha atau proses pelaksanaan kebijaksanaan baik mencakup usaha maupun dampak nyata dari pelaksanaan tersebut yang melibatkan berbagai sumber daya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai bagian dari proses administrasi. Implementasi kebijakan sebagai proses administrasi berarti proses ini dilakukan oleh berbagai aktor secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah sepakati bersama. Selain aktor, implementasi kebijakan juga melibatkan organisasi, prosedur dan berbagai macam teknik untuk tercapainya tujuan kebijakan

c. Model-Model Implementasi Kebijakan

Terdapat banyak model-model implementasi kebijakan untuk menentukan faktor atau variabel yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Model model implementasi ini dibagi dalam tiga pendekatan yaitu, pendekatan *Top-down*, pendekatan

²Leo Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-2, hal.139

Bottom-up, dan pendekatan *Sintesis*. **Pertama**, Model implementasi kebijakan dengan pendekatan *top-down* bersifat sentristik, artinya keputusan atau tindakan kebijakan didominasi oleh keinginan implementor di tingkat pusat atau dengan kata lain kebijakan diterapkan mulai dari atas ke bawah. Salah satu penganut model pendekatan *top-down* ini ialah Mazmanian dan Sabatier. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Anggara (2014: 268), mengemukakan peran penting dalam dari suatu analisis implementasi kebijakan negara adalah “mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi”³. Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier dalam Mulyadi (2016: 70) mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu: Karakteristik dari masalah, Karakteristik kebijakan, dan Variabel lingkungan. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan atau isi dari kebijakan seperti kesesuaian sumber daya, tata cara, agen pelaksana, kelompok sasaran dan cakupan perubahan perilaku atau manfaat dan tujuan dari diadakannya kebijakan. **Kedua**, Model implementasi kebijakan dengan pendekatan *Bottom-Up* yang merupakan kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi targetnya dan sesuai dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksanaannya. Kebijakan ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Salah satu generasi model *bottom-up* ialah Model Richard Elmore, Michael Lipsky dan Benny Hjern (1981). Mulyadi

(2016: 77) mengemukakan bahwa “Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk *mengerjakan sendiri* implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah”⁴. **Ketiga**, Model implementasi dengan pendekatan *Sintesis (Hibrid)*, model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan metode penelitian dengan adanya variabel *independen*, *intervening*, dan *dependen*, dan meletakkan faktor komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan pendekatan model *hibrid* menurut Gogging, dkk. maka dapat diketahui bahwa model implementasi kebijakan sintesis menggabungkan dua pendekatan implementasi yaitu pendekatan rasional *top-down* dengan pendekatan *bottom-up*. Pendekatan ini lebih mengedepankan metode penelitian dengan adanya variabel terikat, variabel antara dan variabel bebas dan faktor komunikasi sebagai penggerak dalam proses implementasi kebijakan.

5. KERANGKA KONSEPTUAL

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier karena dinilai bahwa teori ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menggambarkan atau menerangkan dan mengukur bagaimana implementasi program atau kebijakan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur’an di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Menganalisis implementasi kebijakan negara berarti mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi. Variabel-variabel yang

³ Sahya Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 268

⁴ Deddy Mulyadi. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Cetakan ke-2. Bandung: CV Alfabeta, hal.77

digunakan dinilai tepat untuk mengidentifikasi proses-proses implementasi sesuai dengan ketentuan atau isi kebijakan terhadap hasil yang diperoleh berupa pencapaian tujuan-tujuan formal dari kebijakan pendidikan baca-tulis Al-Qur'an, selain dari tiga variable yang terdapat dalam model implementasi Mazmanian dan Sabatier ini, secara umum dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan.

6. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menjelaskan fenomena secara mendasar atau mengungkap makna dari permasalahan sosial. Penelitian kualitatif berarti penelitian yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai dari yang terdapat dibalik fakta. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif, sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan secara mendalam suatu masalah. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan dan mendeskripsikan makna yang didapatkan dari fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan sehingga menghasilkan data deskriptif permasalahan yang dihadapi dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an di Taman Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga yaitu, *Pertama*, Observasi berupa pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena di lokasi penelitian guna memperoleh keterangan-keterangan atau data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan proses

implementasi kebijakan pendidikan baca tulis Al-Qur'an. *Kedua*, wawancara merupakan cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian melalui proses tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap sesuai dan mengetahui banyak hal tentang fokus dan lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan melakukan tatap muka dengan para informan. Wawancara akan dilakukan secara mendalam (*indepth interview*). *Ketiga*, Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian. Hasil dari dokumentasi menjadi salah satu bukti nyata bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan. Dokumentasi yang dimaksud dalam hal ini berupa dokumen-dokumen, foto-foto atau video yang diambil selama proses penelitian.

7. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model dari Miles, Huberman dan Saldana (2014: 8), yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*drawing conclusions*)⁵. Kondensasi data (*data condensation*), yaitu mengarah pada suatu aktivitas memilih data dengan cara bertindak secara selektif terhadap data yang diperoleh, menyederhanakan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian, mengabstrakkan data atau membuat rangkuman inti dari data yang sudah disederhanakan, dan mentransformasikan data menjadi uraian singkat mendekati dari keseluruhan bagian catatan-catatan tertulis, wawancara dan dokumen-dokumen serta bukti empiris lainnya. Selanjutnya, Penyajian data (*data display*) yaitu, data yang telah diperoleh dalam bentuk

⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*

(3rd ed), London: SAGE Publication Ltd, hal.8

sekumpulan informasi yang telah tersusun secara terpadu dan mudah dipahami kemudian diorganisasikan atau disatukan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Adapun data yang disajikan dalam penelitian ini berbentuk naratif karena memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Data yang telah disusun kemudian menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Langkah selanjutnya berupa Penarikan kesimpulan (*Drawing conclusions*). Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada data-data yang diperoleh selama penelitian. Sehingga data-data diuji validitasnya dan kebenaran kesimpulan dapat teruji kebenarannya. Dalam tahap ini peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap dengan temuan baru.

8. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Karakteristik dari Masalah

Karakteristik dari masalah kebijakan dapat dinilai dari empat indikator yaitu tingkat kesulitan yang dihadapi, tingkat kemajemukan kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data deskriptif bahwa Proporsi kelompok sasaran terhadap populasi dinilai relatif kecil yaitu sebanyak 19 % atau sekitar 21.460 peserta didik yang beragama Islam dari total populasi yang ada di Kecamatan Tamalanrea. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Wahab (2016) bahwa semakin kecil proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi maka akan

memudahkan proses implementasi kebijakan, dengan demikian dapat dinilai bahwa proporsi kelompok sasaran yang relatif kecil tersebut memberi kemudahan dalam pengimplementasian kebijakan baca-tulis Al-Qur'an terkhusus di Kecamatan Tamalanrea. Sementara tingkat kesulitan teknis yang dihadapi menemui beberapa kesulitan yang relatif banyak seperti kemajemukan kelompok sasaran yang beragam, kurangnya tenaga pengajar yang bersertifikat resmi dan tidak tetapnya dana untuk pelaksanaan program baca-tulis Al-Qur'an. Selain itu, program standarisasi sertifikat/lisensi izin mengajar bagi para pengajar Al-Qur'an belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh belum adanya ketetapan resmi terkait lembaga sertifikasi mengajar pendidikan Al-Qur'an. Selanjutnya, kemajemukan kelompok sasaran serta cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dinilai sedang sehingga mempengaruhi atau menghambat proses implementasi kebijakan baca-tulis Al-Qur'an.

b. Karakteristik Kebijakan

Karakteristik kebijakan melihat ciri-ciri dari undang-undang itu sendiri. Karakteristik dari kebijakan dapat diukur dengan tujuh indikator yaitu kejelasan isi kebijakan, dukungan teoritis, keterpautan antar berbagai instansi, konsistensi aturan dari badan pelaksana, komitmen aparat terhadap kebijakan dan akses kelompok luar untuk ikut berpartisipasi dalam kebijakan baca-tulis Al-Qur'an. Keenam indikator tersebut di atas dinilai baik sehingga memudahkan proses implementasi pada tiga tempat Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Kecamatan Tamalanrea yaitu TPQ Jannatul Firdaus, TPQ Masjid Ikhtiar, dan TPQ Al-Amin. Masalah yang ditemukan yaitu indikator alokasi sumber daya finansial yang belum tetap dan tidak terealisasi secara merata yang relatif mempengaruhi pelaksanaan kebijakan

baca-tulis Al-Qur'an. Menurut Wahab (2016) mengemukakan bahwa "Secara umum tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu amat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal kebijakan". Alokasi sumber daya finansial atau Pendanaan pendidikan Al-Qur'an telah di atur dalam Perda Kota Makassar Nomo1 Tahun 2012, pasal 14 yang menyatakan bahwa pendanaan merupakan tanggungjawab pemerintah daerah/kota dan masyarakat sebagai bagian dari anggaran pendidikan nasional dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bantuan yang terealisasi hanya sekitar 15% dan belum merata ke setiap lembaga pendidikan Al-Qur'an. Belum adanya ketegasan teknis terkait besaran tetap bagi alokasi dana untuk program pendidikan baca-tulis Al-Qur'an dan sertifikasi tenaga pengajar pendidikan Al-Qur'an mempengaruhi pengimplementasian program baca-tulis Al-Qur'an sendiri.

c. Variabel LingkunganV

Variabel lingkungan kebijakan dapat dicitra dengan empat indikator yaitu kondisi sosial-ekonomi dan perkembangan teknologi, dukungan publik, sikap kelompok pemilih, dan keterampilan dari implementor kebijakan. Keempat indikator tersebut di atas dapat dikatakan baik dan mendukung pengimplementasian kebijakan baca-tulis Al-Qur'an pada ketiga tempat Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) di Kecamatan Tamalanrea yaitu TPQ Jannatul Firdauz, TPQ Masjid Ikhtiar, dan TPQ Al-Amin. Dukungan publik terhadap kebijakan nomor 1 Tahun 2012 tentang pendidikan baca-tulis Al-Qur'an mendapat banyak dukungan positif dari para masyarakat terutama di lingkungan Kecamatan Tamalanera. sikap dari kelompok pemilih di Kecamatan Tamalanrea

terbilang baik dan mendukung kebijakan. Sikap yang ditunjukkan berupa ikut berpartisipasi membantu pelaksanaan baca-tulis Al-Qur'an dengan menjadi salah satu donatur tidak tetap bagi lembaga pendidikan Al-Qur'an. Selain itu sikap lainnya juga berupa dukungan doa untuk keberhasilan program kebijakan baca tulis Al-Qur'an. keterampilan dari implementor kebijakan baca-tulis Al-Qur'an pada ketiga tempat Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Kecamatan Tamalanrea yaitu TPQ Jannatul Firdauz, TPQ Masjid Ikhtiar, dan TPQ Al-Amin dapat dinilai baik. Sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Wahab sehingga bentuk keterampilan ini dapat dinilai dari keterampilan manajemen para badan pelaksana baik dari segi perencanaan program pendidikan Al-Qur'an, pengorganisasian dan pembagian tugas kepada staf dan pengajar pendidikan Al-Qur'an dan pengawasan kepada setiap pelaksana teknis serta cara memotivasi kelompok sasaran dari kebijakan baca-tulis Al-Qur'an dengan baik Adapun kendala yang dihadapi adalah adanya dampak buruk dari perkembangan teknologi sehingga kelompok sasaran kebijakan atau peserta didik pendidikan Al-Qur'an cenderung terpengaruh perkembangan teknologi seperti penggunaan Handphone, permainan *off-line* seperti Playstation dan film-film kartun melalui media televisi.

9. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi kebijakan pendidikan baca-tulis Al-Qur'an, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca-Tulis Al-Qur'an terimplementasi dengan baik pada ketiga tempat Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang ada di Kecamatan Tamalanrea yaitu TPQ Jannatul Firdauz, TPQ Masjid Ikhtiar, dan TPQ Al-Amin. Namun dalam pelaksanaannya

ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat proses implementasi kebijakan baca-tulis Al-Qur'an seperti dan kesulitan teknis dalam pengajaran Al-Qur'an seperti bervariasinya watak dan karakter peserta didik yang harus diajar, tidak tetap dan tidak meratanya alokasi sumber daya finansial dari Pemerintah, pengaruh buruk perkembangan teknologi seperti penggunaan Handphone, permainan *off-line* seperti Playstation dan film-film kartun melalui media televisi.

10. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penertbit Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2003. *Kebijakan Publik; Konsep & Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Dunn, Willam N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Danim, Sudarwan. 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasbullah, M. 2015. *Kebijakan Pendidikan; Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Amin. 2004. *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Luankali, Bernadus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Amalia Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. Dan Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed)*, London: SAGE Publication Ltd
- Muchsin dan Putra, Fadillah. 2015. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Cetakan ke-2. Malang: Averroes Press.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Cetakan ke-2. Bandung: CV Alfabeta.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi, Teori dan Praktek*. Surabaya: Penerbit PMN.
- Nugroho D, Riant. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho D, Riant. 2006. *Kebijakan Publik; untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Cetakan Pertama. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung. Alfabeta.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cetakan

- ke-1. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- b. Skripsi dan jurnal**
- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Vol. 1. (<http://dx.doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>)
- Basir Anwar, dkk. 2013. *Formalisasi Sistem Pemerintahan Islam (Studi tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah (PERDA) Baca Tulis Al-Qur'an di Kota Makassar)*. Vol. III
- Hayadin. 2011. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kemampuan Baca-Tulis Al-Qur'an*. Vol.9
- c. Sumber Hukum**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.
- d. Sumber Lainnya**
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. 2017. *Produktivitas Padi Menurut Provinsi*. (Online). <https://makassarkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/6>, (diakses 10 Desember 2017).